

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era reformasi birokrasi dan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan desa memegang peranan yang lebih strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Pemerintah desa memegang peranan penting dalam melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan, menyediakan layanan sosial, dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan pemerintahan desa sangat bergantung pada keterampilan para aparatur yang bertanggung jawab di dalamnya.

Desa Cikelet yang terletak di Kecamatan Cikelet merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, dibutuhkan aparatur desa yang kompeten, profesional, dan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Kompetensi pegawai desa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja, menjadi salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembangunan desa.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa antara lain adalah belum memadainya kualitas sumber daya manusia aparatur desa, terbatasnya pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta belum adanya asesmen kompetensi yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program desa.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis yang mendalam terhadap kompetensi pegawai yang ada di Pemerintahan Desa Cikelet. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kompetensi yang dimiliki pegawai desa saat ini, kesenjangan kompetensi yang ada, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa.

Dengan dilakukannya analisis kompetensi ini, Pemerintahan Desa Cikelet dapat merancang program pengembangan sumber daya manusia yang lebih tepat sasaran, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal dan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik.

Bisa terlihat dalam gambaran Negara Indonesia ini memiliki struktur Bangsa yang majemuk dengan keragaman budaya dan tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi,

lebih dari Indonesia juga mempunyai penduduk masyarakat yang sebegitu banyaknya sebesar 281,6 juta jiwa serta kumpulan data base tentang seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Kita akan menemukan bahwa berbagai kementerian telah menerapkan format data base yang perlu dilengkapi. Tidak terlihat secara langsung betapa pentingnya administrasi publik dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah tertera diperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Desa menyatakan: “Desa adalah suatu kesatuan komunal yang sah, yang batas-batas wilayahnya diakui oleh masyarakat, berdasarkan asal usul atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem.” Untuk memahami kinerja aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, penelitian ini berfokus pada Analisis Kompetensi Pegawai Desa terhadap Pelayanan Publik kepada Masyarakat Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.

Peraturan desa adalah upaya untuk mengelola urusan pemerintah yang dibuat oleh peraturan desa dan komite penasihat yang ada. Tugas ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat, sementara pada saat yang sama memperhatikan asal-usul dan kebiasaan yang dihormati dalam konteks pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, implementasi tugas, otoritas dan fungsi administrasi untuk regulasi desa menjadi sangat penting dan berperan dalam mengatur pengembangan juga pengelolaan kegiatan perkotaan dan desa.

Peraturan desa harus bersedia melakukan dengan tepat dan akurat untuk mencapai fungsi aktual. Ini berarti bahwa keterampilan dan jumlah berkualitas tinggi dari komunitas publik atau lokal dapat menyembunyikan jumlah kinerja yang dilakukan di desa. Selain itu, peraturan desa harus menjadi aspek penting dari kerangka kerja untuk pengembangan dan peningkatan kinerja peralatan pemerintah desa dengan mengamati pegawai negeri dari segi pelayanan publik.

Kualitas pengembangan dan peningkatan administrasi publik ini sangatlah harus diperhatikan karena pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tahun 2024 lebih memayoritaskan peran aparatur desa dalam setiap tugas-tugas pengelolaan data dari segi administrasi sebagai komponen penilaian pemerintahan desa itu sendiri.

Peraturan desa menerima hasil maksimal dalam setiap implementasi jika kebangkitan desa memiliki kemampuan atau kemampuan yang sangat tepat melalui keadaan pengetahuan, lembaga pendukung, dan unit kerja tertimbang. Ini karena fungsi manajemen dapat dilakukan dengan benar selama ada dukungan yang memadai dari berbagai sistem. Ketika para peneliti membahas analisis staf administrasi di Desa Cikelet.

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa Cikelet ini sejalan dengan peraturan desa yang menyebutkan bahwa desa memiliki banyak sumber pendapatan, antara lain pariwisata, dunia usaha, pertanian, peternakan, dan perikanan.

2. Alokasi Dana Desa

Pendanaan untuk desa diatur oleh pemerintah kabupaten dan pusat, yang bersumber dari anggaran keuangan daerah dan pusat. Desa Cikelet, yang terletak di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalami penurunan alokasi dari Rp 71 triliun menjadi 75.259 desa pada tahun 2024. Pengurangan dana tahun ini mencapai Rp 787 juta, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warganya. Menurut Pantura Post, Satria S Pamungkas (2024), "Total Dana Desa 2024 di Kabupaten Garut mencapai lebih dari Rp 487 miliar, dengan tiga desa menerima alokasi terbesar hingga Rp 2 miliar." <https://www.panturapost.com/ekonomi/>, diakses 12 Desember).

Desa Cikelet merupakan salah satu desa yang berada di bawah pengelolaan sejumlah desa di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki populasi sebanyak 5.010 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga mencapai 1.576. Jika kita lihat dari segi demografi, penduduk Desa Cikelet yang berada dalam usia produktif, yakni antara 18 hingga 50 tahun, tercatat mencapai 4.563 orang. Selain itu, terdapat sekitar 568 anak-anak yang sedang bersekolah di kawasan Desa Cikelet. Di sisi lain, populasi lansia di desa ini berjumlah sekitar 447 orang (Sumber: Pemerintah Desa Cikelet), 2024 Kepala Desa Cikelet : Ayi Priatna, S.E. (Garut : Berkas Desa Cikelet) h. 1.)

Berdasarkan penjelasan mengenai klasifikasi penduduk desa Cikelet berdasarkan usia dan jumlah penduduk pada tahun 2024, terlihat bahwa 81% dari total penduduk berada dalam usia kerja. Hal ini menandakan bahwa mayoritas penduduk desa Cikelet tergolong produktif, dengan hanya 9% yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi. Desa ini juga memiliki 11 asosiasi lingkungan yang berperan penting dalam pengembangan masyarakat.

Mayoritas penduduk desa Cikelet mengandalkan pertanian dan pekerjaan sebagai buruh tani. Saat ini, mereka mempunyai lahan pertanian yang luasnya mencapai 793,5 hektar, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tanaman, baik swasta maupun komersial.

Oleh karena itu, kemudahan dan kelancaran pengelolaan desa harus didukung oleh pelaksana yang sangat kompeten atau handal, dan tugas perangkat tersebut harus benar-benar mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk mendukungnya.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, layanan ini merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Peran dinas adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional bagian dinas, sedangkan pelaksanaan tugas kepala bagian dinas merupakan fungsi tersendiri (PERMENDAGRI, 2015. Nomor 84. Hal. 4.). Permendagri ini membahas Pelaksana Kewilayahan yang berfungsi sebagai satuan tugas kewilayahan di desa.

Tabel 1.1 Buku Pelayanan yang Berada di Desa

No.	Jenis buku
1	Buku Agenda
2	Buku Ekspedisi
3	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa
4	Buku Tamu Umum
5	Buku Tamu Khusus
6	Buku Notulen Musyawarah
7	Buku Presensi Musyawarah
8	Buku Register Pelayanan Surat
9	Buku Disposisi Surat
10	Buku Presensi Dinas / Ceklock

Sumber : Tupoksi Desa Cikelet Kecamatan Cikelet

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 buku yang tersedia di

kantor desa Cikelet. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan buku-buku tersebut masih tergolong terbatas. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 yang mengatur tentang pemerintahan desa. Di sisi lain, terlihat bahwa pada pemerintahan desa Cikelet, pelaksanaan fungsi-fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terkesan kurang optimal.

Dari delapan pegawai kantor tersebut merupakan lulusan SMA dan sarjana. Dalam situasi seperti ini, sumber daya manusia yang sangat baik dan pekerjaan administrasi harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi, namun hal ini belum berfungsi dengan baik dalam pemerintahan desa.

Serta harus mengetahui tentang manajemen desa itu sendiri, termasuk banyak data dan kegiatan manajemen informasi yang terkait dengan pemerintah, pengembangan dan manajemen sosial di tingkat desa. Ini termasuk catatan, penyimpanan, pemrosesan data, data, dan informasi yang penting untuk peraturan desa dan pengelolaan layanan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, kompetensi pegawai merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemerintahan Desa Cikelet, memiliki tantangan dan peluang unik yang dapat dianalisis melalui pendekatan yang komprehensif.

Faktor kesuksesan administrasi pelayanan publik di lingkungan desa sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilan administrasi pelayanan publik di desa:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Kualitas aparatur desa sangat penting. Kemampuan dalam hal administrasi, teknologi informasi, serta pelayanan publik memengaruhi efektivitas pelayanan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala bagi perangkat desa.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Adanya sistem pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat desa.

3. Ketersediaan Infrastruktur dan Teknologi

Fasilitas seperti jaringan internet, komputer, dan perangkat lunak pendukung administrasi memudahkan pelayanan. Penggunaan sistem informasi desa atau aplikasi

e-government untuk pelayanan publik.

4. Partisipasi Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan publik. Adanya forum musyawarah desa, kotak saran, atau media komunikasi lainnya yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi.

5. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala desa yang visioner, jujur, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan publik mampu membawa perubahan positif. Kemampuan dalam mengelola konflik dan mendorong inovasi pelayanan.

6. Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Efektif

Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan dan tepat sasaran. Perencanaan anggaran yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

7. Peraturan dan Kebijakan yang Mendukung

Adanya regulasi atau kebijakan lokal yang mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik. Penyesuaian dengan peraturan nasional tanpa mengabaikan kearifan lokal.

8. Budaya Organisasi dan Etos Kerja

Budaya kerja yang profesional dan melayani di lingkungan aparatur desa. Penghargaan terhadap integritas dan pelayanan prima.

Kesuksesan administrasi pelayanan publik di lingkungan desa sangat ditentukan oleh kombinasi antara sumber daya manusia yang kompeten, kepemimpinan yang efektif, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai.

Partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan keuangan yang transparan, serta adanya regulasi yang mendukung juga menjadi kunci keberhasilan. Dengan sinergi dari semua faktor tersebut, pelayanan publik di desa dapat berjalan secara efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Masalah ini masih dirasakan pada sumber daya manusia, terutama jika dilihat dari segi pendalaman. Terdapat berbagai fenomena yang muncul dalam pelaksanaan fungsi

administrasi terkait pelayanan desa di Desa Cikelet. Misalnya, daftar desa yang belum lengkap dan etos kerja yang masih belum optimal.

Apalagi melihat perbedaannya antara sumber daya manusia yang ada dipertanian dengan orang-orang yang ada dipertanian sangatlah berbeda dari segi berbagai faktor yang dapat dilihat secara jelas seperti pendidikan, ekonomi yang tidak se maju di pertanian.

Salah satunya kemajuan teknologi saat ini telah mencapai perkembangan yang sangat cepat. Ini menciptakan dampak yang sangat signifikan dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah teknologi yang berbasis web dan telah diterapkan di berbagai sektor, termasuk di sektor pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang otomatis dalam mengelola sistem kepegawaian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara pasal 127 ayat (4) menjelaskan bahwa Sistem Informasi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlandaskan teknologi informasi yang mudah digunakan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya.

Hal ini sejalan dengan era baru yang muncul dalam dunia pemerintahan, yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan sistem informasi. Di mana pemerintah berupaya memanfaatkan perangkat komputer, aplikasi, dan sarana telekomunikasi guna memperbaiki kinerja pegawainya secara signifikan

Setiap topik yang diusulkan di atas menawarkan pendekatan yang menarik dan relevan untuk menganalisis kompetensi pegawai di Pemerintahan Desa Cikelet. Dengan mempertimbangkan relevansi, kebaruan, signifikansi, koneksi interdisipliner, dan pertimbangan etis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kompetensi pegawai di tingkat pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang manajemen sumber daya manusia dan pemerintahan desa.

Berdasarkan pendeskripsian diatas maka itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan berjudul : “*Analisis Kompetensi Pegawai Di Pemerintahan Desa Cikelet Kecamatan Cikelet.*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang dikemukakan di latar belakang maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana kompetensi pegawai desa pada aspek penyelesaian tugas dan kewajibannya selaku aparatur desa ?
2. Bagaimana kinerja aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya di Desa Cikelet ?
3. Bagaimana tujuan desa dengan kompetensi aparatur desa saat ini ?
4. Bagaimana tupoksi dari kepala desa beserta aparatur desa cikelet ?

C. Tujuan Penelitian

Bersandar pada uraian di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam operasional pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap warga di Desa Cikelet Kabupaten Garut, Kecamatan Cikelet Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Desa Cikelet, Kabupaten Garut, Kecamatan Cikelet, Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik aparatur di Desa Cikelet kepada masyarakat.
4. Untuk mengetahui tugas dan wewenang dari kepala desa dan perangkat desa

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan kontribusi pada bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam kerangka tata kelola desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang membahas kompetensi pegawai di sektor publik, khususnya tata kelola desa.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a) Pemerintahan Desa Cikelet :

Memberikan gambaran akurat tentang tingkat keterampilan karyawan saat ini, yang berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam konteks desa.

b) Pegawai Pemerintahan Desa :

Memberikan umpan balik pada bidang kompetensi yang memerlukan peningkatan, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

c) Pemangku Kepentingan Lain (Camat, DPMD, dll) :

Berfungsi sebagai sumber daya penilaian dan faktor dalam pelatihan dan peningkatan kemampuan pejabat desa untuk meningkatkan penyampaian layanan publik.

E. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilaksanakan dikantor Desa Cikelet penjelasan yang memuat asumsi-asumsi dasar dan definisi operasional yang berupa suatu teori atau penalaran yang logis. Dalam konteks ini, kerangka teoritis berfungsi sebagai asumsi dasar, yang bisa berupa asumsi atau pendapat ahli yang belum diteliti, atau bisa juga berupa hipotesis, asumsi yang telah teruji kebenarannya.

Asumsi dasar ini menjadi dasar konstruksi hipotesis. Kerangka teoritis dan pemikiran logis sangat penting untuk merumuskan variabel menjadi definisi operasional dan konstruksi yang terukur. Dalam penelitian kuantitatif, definisi operasional biasanya diwakili oleh teori indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tergantung pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.

Rahmat (2019) berpendapat bahwa kompetensi adalah sifat pribadi yang sangat terkait dengan kinerja yang sukses atau luar biasa dalam lingkungan kerja tertentu. Sebagai sifat dasar, kompetensi mewujudkan aspek yang mendalam dan kohesif dari karakter individu, yang memungkinkannya untuk meramalkan tindakan dalam konteks profesional yang beragam. Selain itu, kompetensi terkait erat dengan perilaku dan kinerja, karena dapat memengaruhi dan meramalkan keduanya.

Sementara itu, Rachmaniza (2020) menunjukkan bahwa kompetensi merupakan sifat utama yang mempengaruhi efisiensi kinerja personal dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Atribut ini memiliki hubungan kausal dengan standar yang diterapkan sebagai acuan untuk menilai kinerja yang efektif atau luar biasa di tempat kerja pada situasi tertentu.

Gultom (2019) menekankan bahwa kompetensi mencakup kemampuan individu dalam mencapai hasil yang puas di lingkungan kerja. Hal ini mencakup kemampuan seseorang untuk mentransfer dan menerapkan keterampilan serta pengetahuan yang dimilikinya ke dalam situasi baru, sehingga mampu meningkatkan manfaat sesuai yang telah disepakati.

Edison, Anwar, dan Komariyah (2018) menjelaskan bahwa dimensi kompensasi didasarkan pada perilaku yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari tiga aspek utama :

Pengetahuan menunjukkan pemahaman yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau kursus yang berkaitan dengan pekerjaan spesifik yang sedang dilakukan. Keahlian (Skill) : Aspek ini menekankan kemampuan seseorang dalam bidang pekerjaannya, termasuk ketrampilan yang mendalam dalam menghadapi detail tugas. Selain itu, seseorang harus memiliki kemampuan (ability) untuk memecahkan masalah secara cepat dan efisien.

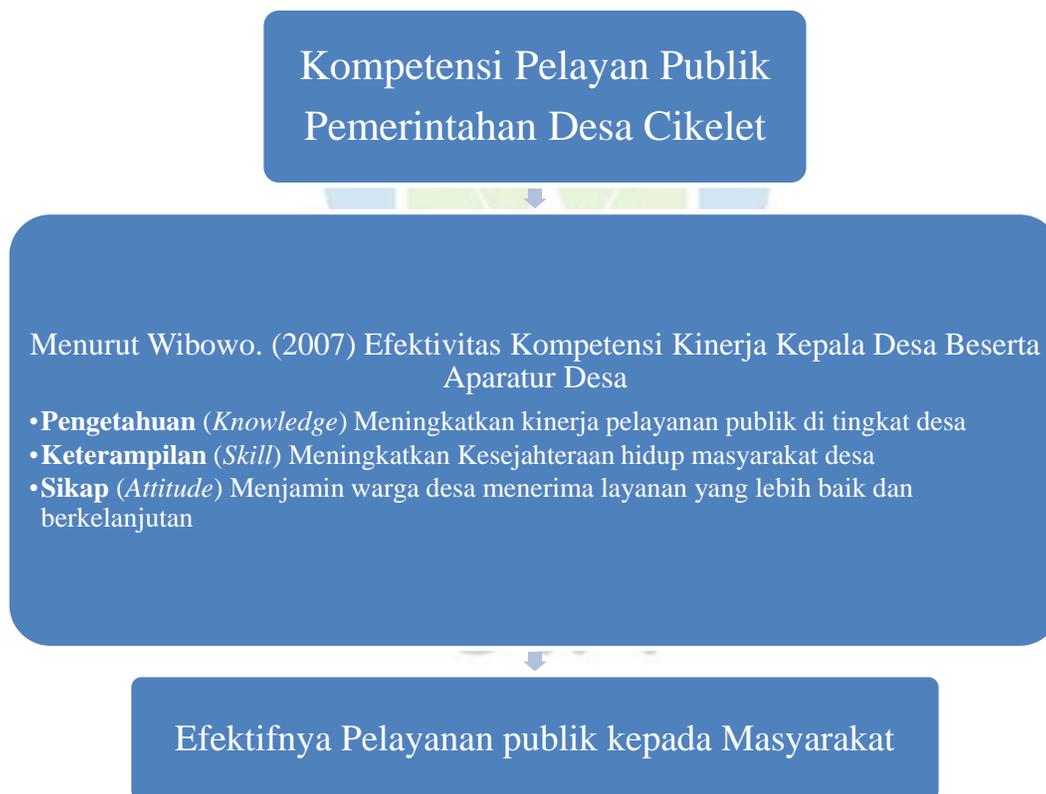
Sikap (Attitude) : Sikap mencakup komitmen terhadap etika organisasi dan memiliki pandangan positif, seperti ramah dan sopan dalam berinteraksi. Sikap ini integral dengan pelaksanaan tugas dan keberhasilan dalam pekerjaan, serta berpengaruh signifikan terhadap citra perusahaan atau organisasi.

Secara keseluruhan, ketiga dimensi ini saling terkait dan memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta profesional. Menurut Rahmat (2019), terdapat lima karakteristik kompetensi yang dapat berfungsi sebagai indikator dalam mengukur kompetensi seseorang, yaitu:

Motif : Merupakan suatu pemikiran atau keinginan yang terus-menerus ada dalam diri individu, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk bertindak pada.

- a) Sifat : Mengacu pada karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi yang diterima.

- b) Konsep diri : Ini berkaitan dengan sikap dan citra diri yang dimiliki oleh seseorang.
- c) Pengetahuan: Merupakan informasi yang dikuasai oleh individu dalam bidang tertentu.
- d) Keterampilan : Menunjuk pada kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau mental yang spesifik.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1) Kondisi Awal

Pemerintahan Desa Cikelet memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pegawai desa memegang peranan strategis. Namun, kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas, yang dapat disebabkan oleh rendahnya kompetensi pegawai.

2) Permasalahan

Beberapa indikasi permasalahan yang muncul antara lain:

- Kurangnya kesadaran karyawan terhadap tanggung jawab dan peran utama.
- Lemahnya kemampuan dalam penggunaan teknologi dan administrasi desa.
- Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan.

3) Teori/Dasar Konseptual

Untuk menganalisis kompetensi pegawai, digunakan pendekatan dari teori kompetensi menurut Spencer & Spencer (1993), yang mencakup:

- Knowledge (Pengetahuan)
- Skill (Keterampilan)
- Attitude (Sikap)
- Behavior (Perilaku)

Kompetensi mencerminkan kemampuan aktual seseorang dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif.

4) Analisis

Melalui pendekatan tersebut, dilakukan identifikasi:

- Kompetensi apa saja yang sudah dimiliki oleh pegawai desa.
- Kompetensi apa yang masih kurang dan menjadi penghambat kinerja.
- Faktor penyebab kekurangan kompetensi (misalnya rekrutmen, pelatihan, budaya kerja).

5) Solusi atau Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil analisis, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

- Peningkatan kapasitas melalui pelatihan berbasis kebutuhan.
- Penataan sistem rekrutmen dan evaluasi berbasis kompetensi.
- Penguatan budaya kerja profesional di lingkungan pemerintahan desa.

6) Tujuan Akhir

Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Pemerintahan Desa Cikelet melalui peningkatan kompetensi pegawainya.

F. Proposisi

Proposisi dalam penelitian ini yaitu Analisis Kompetensi Pegawai Di Pemerintahan Desa Cikelet Kecamatan Cikelet dapat tercapai apabila didukung oleh pemahaman kepala desa beserta aparatur desa akan tufoksinya sebagai pelayan masyarakat di desa cikelet, di tunjang dengan pendidikan yang memadai dan pemahaman terhadap ilmu pendidikan agama. Sehingga setiap ada rencana akan tepat sasaran, tepat waktu, dan akan tercapai visi dari desa, serta akan ada perubahan yang nyata.

